

Sinergi Atasi Banjir Jakarta

Oleh:

Dwi Lintang Lestari, Marsya Dyasthi Putri, dan
Khalidah Nurul Azmi
Indonesia Water Institute

Dalam mengatasi banjir Jakarta, harus dilakukan upaya dari hulu hingga hilir. Dalam situasi yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, Jakarta terlambat mengatasi atau mencegah banjir. Salah satunya disebabkan kurangnya sinergi dari pemerintah daerah dengan pihak lain serta tidak fokus kepada kondisi curah hujan yang tinggi. Saat banjir Jakarta tanggal 1 Januari 2020, terjadi pemerintah fokus terhadap pergantian tahun. Kejadian banjir yang terjadi dini hari saat pergantian tahun, sudah terlambat untuk ditangani. Seharusnya, bila pemerintah daerah sigap, evakuasi dini dapat dilakukan, baik terhadap kendaraan atau warga (seperti ibu hamil dan lansia). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pemerintah gagap dalam menghadapi bencana.

Jakarta sudah seharusnya piawai dalam menghadapi banjir, karena banjir terjadi setiap tahun. Akan tetapi, seringkali pemerintah dan masyarakat lupa dan pola berpikir tidak berubah. Dalam menghadapi banjir yang saat ini sudah terjadi, hal yang dapat dilakukan pertama kali adalah dengan fokus menyelamatkan warga terdampak banjir. Kemudian, ketika banjir sudah surut adalah cara evakuasi kendaraan, pemulihan tanggul yang jebol, sembari diikuti persiapan untuk menghadapi situasi banjir yang lebih berat karena saat ini masih di awal musim hujan. Beban limpasan yang diterima DKI sangat tinggi, mengingat luasan limpasan di hulu juga lebih besar daripada luas wilayah DKI itu sendiri. Ketika bicara banjir Jakarta, maka yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana curah hujan di hulu dan memastikan curah hujan dalam kota dapat dialirkan keluar dari ibukota.

Pasca banjir 2007, disusun solusi terpadu untuk mengatasi banjir sehingga sistem yang dilakukan daerah hulu hingga hilir harus sinkron. Di tahun 2013, terjadi lagi banjir dan tanggul jebol. Akhirnya, disepakati bahwa akan dilakukan pendekatan terpadu, yaitu menyelesaikan di daerah hulu dengan 2 hal, yaitu kesatu, non struktural (menghimbau pemda dan masyarakat setempat untuk tidak lagi melakukan konversi ruang resapan menjadi pemukiman dan daerah komersial), dan kedua, yaitu meminta bantuan kepada pemerintah daerah dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan waduk retensi guna menahan air agar tidak masuk ke Jakarta dalam waktu seketika. Akan tetapi, pada kondisi nyata, proses pembebasan lahan dan himbauan penghentian konversi lahan sulit dilakukan.

Dalam hal bersamaan, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk melakukan beberapa hal diantaranya, normalisasi badan air (waduk dan situ dikembalikan fungsinya dan diperdalam; sungai utama seperti Ciliwung, Pesanggrahan dan Krukut juga dinormalisasi, drainase dalam kota dibenahi, penerapan sumur resapan, biopori dan sumur injeksi). Bagian yang paling signifikan adalah normalisasi, karena sudah disepakati bersama dengan pemerintah pusat. Tugas dari Kementerian PUPR adalah membangun fisiknya, sedangkan tugas dari pemerintah DKI Jakarta adalah mengupayakan pemindahan warga dan pembebasan lahan sehingga pelebaran sungai dan pemasangan turap bisa dilakukan. Hal ini terhenti ketika adanya pergantian pemimpin di DKI, dikarenakan adanya preferensi untuk melakukan naturalisasi daripada normalisasi.

Naturalisasi, pendekatan dilakukan berbasis alam. Akan tetapi, kondisi ideal untuk menerapkan ide tersebut tidak mungkin

dilakukan di Jakarta. Sebagai ilustrasi, upaya normalisasi tidak dilakukan dengan menggusur dan membiarkan warga menggunakan badan sungai yang ada, kemudian tidak ada betonisasi di sungai diganti dengan adanya batu kali dan tanaman, seperti ilustrasi yang diperlihatkan pada penerapan di Singapura. Akan tetapi, hal ini tidak menjawab masalah DKI Jakarta, karena bila ingin melakukan naturalisasi, tetap perlu dilakukan pemindahan warga dari lokasi yang ada. Tidak mungkin membuat suatu sistem tata kelola air berjalan alami, tanpa membebaskan sempadan sungai.

Kedua, konsep menahan air selama mungkin di darat agar dapat meresap. Ini yang saat ini terjadi, tanpa didesain air tertahan di darat dan tidak mengalir ke laut. Konsep naturalisasi untuk diterapkan di Jakarta sangat membahayakan sekali terhadap keamanan warga Jakarta.

Sementara yang dilakukan dengan normalisasi, adalah dengan mengembalikan kapasitas angkut dan tampung sungai dari kondisi saat ini yang semakin mengecil dan dangkal sementara debit bertambah. Upaya yang dilakukan dengan mengeruk dan melebarkan serta pemasangan turap di kiri kanan, juga pembebasan lahan untuk dibuatkan jalan inspeksi untuk memudahkan tindakan pemeliharaan dan perbaikan. Ini yang disebut normalisasi, air akan secepat mungkin langsung mengalir ke laut karena tidak diperbolehkan adanya hambatan walau sebentar karena dapat memunculkan genangan.

Dengan melihat kondisi curah hujan dan kapasitas sungai di tahun 2007, dimana kapasitas air yang melewati Ciliwung adalah 750 m³/detik, padahal kapasitas maksimum Ciliwung hanya 500 m³/detik, maka tidak heran banjir Jakarta tidak dapat dihindari. Normalisasi yang belum selesai berdampak pada kondisi Jakarta yang tidak cukup menampung air limpasan.

Dalam konsep tata kelola air perkotaan dengan penduduk padat, palung sungai harus di-*backup* dengan sempadan sungai yang lebarnya bisa mencapai 5-10 kali dari lebar sungai, yang nantinya bila curah hujan maksimum akan dibiarkan terendam (tidak ada hunian di bantaran sungai). Hal ini dikarenakan sudah ada prediksi 5 atau 10 tahun sekali akan terendam, sehingga bantaran sungai hanya diizinkan untuk aktivitas sosial saat musim kemarau.

Konsep naturalisasi sebenarnya memang ada dalam tata kelola air, tetapi kondisi ideal aplikasi naturalisasi adalah di tempat yang tidak memiliki beban limpasan yang tinggi dan cepat, biasanya di perumahan (untuk aspek estetika). **BUKAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN BANJIR.**

Konsep naturalisasi sebaiknya diikuti dengan analisis bahwa kondisi Singapura dan Jakarta sangat berbeda. Singapura merupakan negara yang dikelilingi laut, sehingga kemana pun air mengalir akan langsung ke laut. Berbeda dengan Jakarta, yang posisinya di hilir dan menampung air yang berasal dari daerah tangkapan. Hal ini seharusnya dipahami secara logika oleh pemerintah DKI Jakarta.

Selain pembebasan lahan, cara lainnya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan menggalakkan setiap rumah yang ada di Jakarta ($\pm 2,2$ juta rumah terbangun), untuk mampu menampung 1m³ air yang turun, sehingga ada 2,2 juta m³ air tidak masuk ke selokan ketika hujan turun. Bila dianalogikan dengan waduk Sukamahi yang memiliki kapasitas 1,6 juta m³, berarti tidak perlu adanya pembangunan waduk. Akan lebih baik lagi bila setiap rumah juga membantu peresapan air ke dalam tanah.

Tidak adanya semacam insentif atau pemaksaan untuk setiap rumah berdampak pada rendahnya kepedulian warga terhadap isu banjir. Hingga tahap ini himbauan tidak lagi efektif, perlu dilakukan *enforcement* dimana nantinya bila



rumah tersebut membayar PBB dan ternyata rumah tersebut tidak memiliki resapan, maka PBB yang dibayar dua kali lipat. Dengan demikian, rumah tersebut akan terpaksa membuat lahan resapan. Upaya lainnya dapat dilakukan melalui APBD Jakarta, dengan mengalokasikan pembuatan sumur resapan di lahan penduduk. Upaya lain dalam mengatasi banjir, salah satunya dengan memompa air keluar dan berlatih dalam menghadapi musim hujan berikutnya.

Saat ini tidak diperlukan satu badan khusus untuk jalur komunikasi bagi kepala daerah dan pihak berwenang untuk menghadapi masalah banjir. Yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan untuk berkomunikasi. Masing-masing daerah sudah ada otoritas/unit yang bertanggung jawab mulai dari kejadian pertama sampai saat evakuasi, sampai pasca banjir (BNPB, BPBD, PMI, Damkar, dinas tata air). Sistem komunikasi juga sudah sangat baik (video atau teks). Yang dibutuhkan hanya kemauan berkomunikasi dan berbagi peran.

Terkait masalah anggaran, karena di masing-masing daerah (khususnya DKI Jakarta)

dibutuhkan politik anggaran yang kuat. Alokasi anggaran harus mengarah dengan persoalan yang dihadapi setiap musim, politik anggaran memastikan dana cukup untuk mengantisipasi masalah yang datang. Kemudian bila terjadi yang tidak diinginkan, anggaran tersebut juga cukup untuk dana operasi, evakuasi obat dan makanan, mobilisasi. Selain itu, untuk pasca kejadian, membenahi tanggul kembali, menyambung pipa air dan sebagainya.

Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakatnya harusnya lebih cerdas dari setiap kejadian, karena bila tidak akan sia-sia dan semakin banyak korban nyawa. Edukasi banjir sangat perlu dilakukan sebagai bagian dari sistem *survival*. Pembagian tugas untuk mengatasi banjir sudah dibagi, persoalan yang paling sulit adalah masalah sosial (kebutuhan ruang) yang seharusnya ditangani pemerintah daerah, karena bersentuhan langsung dengan rakyat. Ini adalah tugas bersama dan harus segera dituntaskan jalan keluarnya, agar upaya struktural dari pemerintah pusat tidak sia-sia (22/01/2020).